

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pelaksanaan Otonomi Daerah menjadi peranan penting dalam proses pembangunan yang perlu dilakukan oleh masing- masing daerah. Perubahan pada sistem pemerintahan di daerah menjadikan dorongan bagi daerah untuk melakukan pembangunan yang menjadi tuntutan masyarakat demi meningkatkan kesejahteraan (Jamilah, 2020). Dalam melaksanakan otonomi daerah yang tepat perlu diikuti dengan beberapa faktor yang mendukung, seperti kemampuan dari pihak pelaksana atau Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Organisasi Perangkat Daerah sendiri menjadi pihak yang bertanggung jawab besar dalam setiap pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan. Dalam Peraturan Pemerintah No 18 Tahun 2016 telah menegaskan bahwa pembentukan dari Perangkat Daerah didasarkan pada asas efisiensi, efektivitas pembagian tugas, rentng kendali, tata kerja yang jelas, dan fleksibilitas. Dengan adanya peraturan tersebut, maka pemerintah mempunyai tanggung jawab besar dalam perwujudan segala sesuatu yang diperlukan oleh masyarakat, seperti pelayanan publik dan pembangunan infrastruktur.

Pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara Nomor 3 Tahun 2020 ditegaskan bahwa keberhasilan pemberian pelayanan publik ditentukan dari pelayan yang diberikan. Untuk memperoleh sumber daya aparatur yang mendukung dan kompeten, penerapan hubungan antar aparatur menjadi hal yang paling efektif dilakukan yaitu dengan komunikasi dan koodinasi yang kontinu (Setiawati, 2018). Dalam pelaksanaan urusan pemerintahan di segala bidang, dipengaruhi oleh peranan aparatur yang ada, maka koordinasi antar aparatur yang ada sangat diperlukan singa terwujudnya tujuan secara maksimal.

Koodinasi merupakan usaha yang dilakukan untuk menyelaraskan kegiatan yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan yang ada. Hal ini juga perlu diterapkan

di instansi pemerintahan yang sebagian besar memiliki tujuan bersama dalam memberikan pelayanan namun dengan bermacam peran yang dilakukan. Selain sebagai penyelaras kegiatan yang ada, koordinasi juga dapat memberikan ruang bagi pihak lain dalam menyatukan tujuan tanpa adanya pihak yang dirugikan (Ngetje et al., 2019). Koordinasi sendiri mempunyai peran penting dimana dalam setiap program pemerintah baik pembangunan dan pelayanan yang melibatkan beberapa instansi. keterlibatan instansi lain dalam program yang direncanakan menjadi bentuk koordinasi antar instansi yang memberikan manfaat bagi pelaksanaan program yang direncanakan.

Penggunaan media elektronik pada pelaksanaan tugas bukan hanya bentuk partisipasi pemerintah pada perkembangan teknologi, namun juga perubahan pada system kerja yang akan diterapkan. Sebelum penggunaan teknologi dalam penyelesaian tugas diterapkan, penyelesaian tugas yang dilakukan masih belum dapat mewujudkan tujuan secara menyeluruh. Hal ini biasanya dilatar belakangi oleh kurangnya disiplin para aparatur, kendala pada portal atau aplikasi yang digunakan, dan rumitnya data yang diinputkan sehingga tidak adanya efektifitas dan efisiensi dari kinerja aparatur sebelumnya (Musin, 2018). Dengan berkembangnya penggunaan teknologi yang ada dapat memperlihatkan kinerja secara real dan juga membantu penyelesain tugas dan kewajiban secara efektif dan efisien.

Pada Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik mengharuskan instansi pemerintahan baik di pusat dan di daerah untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang efektif, bersih, transparan dan akuntabel. Dengan munculnya peraturan ini, maka segala sesuatu hal yang menyangkut dengan Pemerintahan perlu melakukan inovasi yang mencerminkan pelaksanaan peraturan Presiden No 96 Tahun 2018. Beberapa cara yang menjadi inovasi terbaik adalah dengan adanya website portal resmi, hingga penggunaan dan penciptaan aplikasi dalam menunjang kinerja organisasi.

Peraturan Presiden No 96 Tahun 2018 ini juga menjadi landasan bagi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Temanggung dalam penginputan data pada Aplikasi Bank Data Pembangunan dari berbagai OPD serta pelaporannya yang terintergritas dengan Gabungan Data Temanggung (GANDEM). Pada portal resmi media center kabupaten Temanggung, data yang input oleh berbagai OPD nantinya akan digunakan oleh Bappeda dalam perencanaan pembangunan yang akan dilaksanakan, sehingga pelaporan data harus dilakukan secara rutin. Namun dalam pelaksanaan input data, masih adanya permasalahan yang terjadi pada aplikasi yang ada seperti data yang tidak muncul meskipun sudah melakukan input data. Hal ini dikarenakan adanya masalah pada aplikasi sehingga diperlukannya pembaruan yang nantinya akan menyempurnakan format laporan yang diinput.

Dalam input data yang dilaksanakan oleh beberapa OPD di kabupaten Temanggung, tentunya memerlukan komunikasi dan koordinasi yang baik. Dengan pelaksanaan koordinasi yang baik maka proses input data yang diselenggarakan oleh Dinas Kominfo Kabupaten Temanggung akan terwujud sesuai sasaran, karena kegiatan ini akan mempengaruhi perencanaan pembangunan di Kota Temanggung itu sendiri. Jika kesalahan data yang di input oleh satu OPD saja, maka akan berpengaruh terhadap OPD yang lain karena perencanaan pembangunan melibatkan seluruh OPD yang ada. maka perlunya koordinasi berkelanjutan yang dilakukan dengan melibatkan OPD terkait di kabupaten Temanggung khususnya dalam hal penginputan data pada aplikasi Bank Data Perencanaan.

Pada awal tahun 2020 ini, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional memberikan Penghargaan kepada Kabupaten Temanggung sebagai Kabupaten dengan Perencanaan dan Pencapaian terbaik. Pada tahun sebelumnya, kabupaten Temanggung juga mendapatkan penghargaan dengan kategori yang sama, namun berada di posisi ke II. Sehingga dari tahun 2019 ke 2020 Temanggung telah menunjukkan peningkatan dalam hal Perencanaan dan Pencapaian dalam pembangunan daerahnya. Dari

pembangunan yang terus mengalami perkembangan, maka akan mempengaruhi pelayanan kepada public dan kesejahteraan masyarakat akan tercapai. Sehingga perlunya ketelitian setiap OPD dalam memberikan laporan.

Peranan penting dalam kasus ini adalah kinerja dari Dinas Komunikasi dan Informatika, karena penyelenggara dari kegiatan ini adalah Dinas Komunikasi dan Informatika. Penelitian yang dilakukan oleh Darmanto dan Nur Zaini (2020) menunjukkan bahwa kinerja implementasi Kominfo Tahun 2016 di Kabupaten Temanggung masih sangat rendah. Dari empat variable yang memengaruhi kinerja implementasi menurut modal Edward, hanya variable sumber-sumber saja yang terbilang masih mendukung, sedangkan variabel komunikasi, variabel kecenderungan, dan struktur birokrasi tidak mendukung kinerja implementasi. Ketidaksinkronan ini memiliki beberapa kemungkinan penyebab, yakni antara ketidaksesuaian data yang diterima dan kelambatan penerimaan data dari teknologi yang menggunakan peran dari Dinas Komunikasi dan Informasi (Diskominfo) Kabupaten Temanggung secara langsung.

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis berminat untuk meneliti mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi koordinasi antar organisasi perangkat daerah di Kabupaten Temanggung Tahun 2020.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana koordinasi yang dilakukan oleh Organisasi Perangkat Daerah tahun 2020?
2. Faktor- faktor apakah yang mempengaruhi koordinasi yang dilakukan oleh Organisasi Peranagkat Daerah tahun 2020?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Mengetahui koordinasi yang dilakukan oleh Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten Temanggung tahun 2020.

2. Mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi koordinasi yang dilakukan oleh Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten Temanggung tahun 2020.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

1. Sebagai pijakan dan referensi bagi penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan koordinasi yang dilakukan oleh Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten Temanggung.
2. Memberi masukan dan pengembangan Ilmu Pemerintahan, khususnya dalam kajian mengenai koordinasi yang dilakukan oleh organisasi pemerintah.
3. Memberikan masukan kepada organisasi perangkat daerah untuk terus melakukan koordinasi dalam menjalankan segala tugas dalam urusan pemerintahan.

1.4.1 Manfaat Praktis

Sebagai rujukan bagi Pemerintah di Kabupaten Temanggung dalam meningkatkan koordinasi untuk mewujudkan Organisasi Perangkat Daerah yang komunikatif dalam perwujudan tujuan.

1.5 Tinjauan Pustaka

Ester (2017) meneliti dengan menggunakan metode kualitatif tentang koordinasi Badan Pada Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan di Kabupaten Sekadau di tahun 2017. Hasil penelitian menunjukkan bahwa koordinasi internal sudah dilakukan dengan baik dengan dibuktikan dengan laporan pertanggungjawaban serta tidak adanya tumpang tindih pekerjaan, dan juga pelaksanaan monitoring juga pada setiap bidangnya tetap dilaksanakan. Pada penelitian ini faktor koordinasi yang diterapkan lebih kepada faktor pembagian kerja.

Setiawati (2018) dengan menggunakan metode kualitatif pada penelitian yang membahas mengenai koordinasi antar instansi dalam inovasi layanan pengaduan

darurat command center 112 di kota Surabaya. Hasil penelitian menunjukkan koordinasi yang dilakukan oleh dinas terkait sudah maksimal baik koordinasi vertical maupun horizontal, serta faktor-faktor dari koordinasi sudah dilaksanakan secara menyeluruh. Koordinasi yang tepat dilakukan telah membuat layanan pengaduan darurat command center 112 dapat terealisasi sesuai dengan tujuan utama.

Hartono (2016) meneliti mengenai koordinasi antar lembaga dan stakeholder dalam pengembangan taman bacaan masyarakat di kota Surabaya dengan menggunakan metode kualitatif. Selain melakukan koordinasi secara horizontal antara Dinas Badan Arsip dan Perpustakaan Kota Surabaya dengan kelurahan Genteng Surabaya, koordinasi secara vertical juga dilaksanakan dalam perwujudan Taman Bacaan Masyarakat secara maksimal. Faktor yang paling diterapkan pada pola koordinasi ini adalah faktor kesatuan tindakan. Selain faktor tersebut ada pula faktor tambahan yang menjadi alasan dilakukannya koordinasi, yaitu faktor anggaran.

Rahmenia (2018) meneliti menggunakan metode kualitatif tentang koordinasi dalam program kampung Keluarga Berencana (KB) di kota Pekanbaru. Koordinasi yang dilakukan oleh Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Riau dengan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana kota Pekanbaru dijalankan sesuai dengan baik dan faktor koordinasi yang diterapkan lebih kepada faktor pembagian kerja dan disiplin. Hal terpenting dalam melakukan koordinasi adalah pada faktor pembagian kerja, pembagian tugas dan fungsi masing-masing instansi dilaksanakan dengan baik maka faktor lain akan mudah untuk diwujudkan. (Asri & Fatahillah, 2019)

Syauqi (2017) melakukan penelitian dengan menggunakan metode kuantitatif tentang pengaruh koordinasi dan disiplin kerja terhadap kinerja pegawai sekretariat kota administrasi Jakarta Selatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dengan dilakukannya koordinasi antar unit kerja akan memberikan pengaruh pada faktor disiplin kerja. Pada koordinasi yang dilakukan pada Dinas Kependudukan dan Catatan

Sipil di Kabupaten Serdang Begadai pada pelayanan e-KTP yang menggunakan metode kuantitatif menunjukkan bahwa pelaksanaan koordinasi harus dilakukan untuk mewujudkan efektifitas pelayanan e-KTP (Santya, 2017). Dalam pelayanan ini, koordinasi yang dilakukan oleh disdukcapil adalah faktor pembagian kerja dan disiplin.

Namun demikian banyak penelitian terdahulu yang meneliti mengenai koordinasi, dapat disimpulkan hanya faktor pembagian kerja, faktor disiplin, faktor kesatuan tindakan, dan juga faktor tambahan yaitu anggaran yang menjadi alasan ketika melakukan koordinasi. Sedangkan faktor hubungan kerja masih kurang diteliti. Padahal di era modern ini Indonesia telah menerapkan sistem pemerintahan yang berbasis elektronik. Hal ini menunjukkan bahwa ada gap dalam koordinasi yang dilakukan oleh organisasi pemerintah daerah

1.6 Kerangka Teori

1.6.1 Koordinasi

1.6.1.1 Pengertian

Menurut Muhammad dan Rois (2016) koordinasi merupakan cara untuk memadukan tujuan yang dituju dari kegiatan yang dijalankan secara efisien. Koordinasi dilakukan sesuai dengan kebutuhan komunikasi sehingga sifat ketergantungan tidak akan memberatkan. Melakukan sebuah kegiatan dengan tujuan yang jelas menjadi bakal dilakukannya koordinasi, baik secara individu maupun kelompok. Namun dalam pelaksanaan kegiatan, setiap pihak terkait sudah mengetahui fungsi dan tugas masing-masing, sehingga tidak semua hal dikoordinasikan.

Mahsyar (2011) menjelaskan bahwa fungsi dan tugas yang dilaksanakan individu maupun kelompok disesuaikan dengan tupoksi. Dalam kegiatan yang direncanakan tentunya membutuhkan peran dari pihak lain sehingga proses kegiatan akan dirasa lebih mudah untuk dilaksanakan. Semakin banyak kegiatan yang dikerjakan oleh individu atau kelompok dari unit yang berbeda, akan sering pula koordinasi yang dilakukan untuk memangkas terjadinya masalah. Titto dan Toddy

(2018) mengatakan “Coordination is one of the management functions that are closely related to other management functions”. Koordinasi mempunyai hubungan yang erat antara satu hal dengan yang lainnya. Dalam suatu hal akan ada kelebihan dan kekurangannya, dengan kesempatan ini koordinasi akan menutupi kekurangan yang ada dengan masukan dari pihaklain.

1.6.1.2 Jenis Koordinasi

Menurut Ndraha (2011) terdapat beberapa jenis koordinasi di lingkungan pemerintahan, yaitu:

a. Koordinasi waktu

Proses dalam menentukan kegiatan yang termasuk dalam kegiatan serentak atau berurutan, dan juga diberikan kejelasan dalam proses pelaksanaannya. Koordinasi ini dilakukan pada kegiatan antar unit kerja yang terkait.

b. Koordinasi Ruang

Koordinasi ini diterapkan ketika kegiatan yang dilaksanakan berada didalam lingkup daerah kerja.

c. Koordinasi Interinstitusional

Koordinasi yang dilakukan antara berbagai unit yang berkepentingan atas suatu proyek serbaguna.

d. Koordinasi Fungsional

Koordinasi yang dilaksanakan oleh unit kerja satu dengan yang lainnya, dimana kegiatannya secara objektif berhubungan secara fungsional.

e. Koordinasi Structural

Koordinasi antar unit kerja yang berada dibawah naungan struktur kerja tertentu. Dalam pelaksanaannya koordinasi ini dilakukan secara sukarela sesuai kehendak dari unit kerja yang akan melakukan koordinasi.

f. Koordinasi Perencanaan

Koordinasi yang dilaksanakan untuk mengantisipasi terjadinya kegagalan dan mewujudkan keberhasilan antar unit kerja. Biasanya koordinasi ini berlangsung antar unit kerja interdependen dan dependen.

1.6.1.3 Fungsi Koordinasi

Menurut Handyaningrat (1989) koordinasi memiliki fungsi- fungsi sebagai berikut:

a. Fungsi Managemen

Selain adanya fungsi perencanaan, penyusunan pembinaan hingga monev. Fungsi menagemen juga penting dalam melakukan koordinasi dimana fungsi ini lebih menjelaskan peranan dari pimpinan.

b. Kelancaran Mekanisme

Prosedur dan komponen kerja harus jelas dan juga dalam pencapaian tujuan harus menghindari perselisihan antar komponen dna memaksimalkan kerjasama antar komponen.

c. Integrasi

Usaha dalam mengarahkan dan menyatukan kegiatan perlu adanya keterpaduan dari segala aspek yang dilakukan. Dengan perwujudan prinsip integrasi dan sinkronisasi, maka menyatukan dan melaksanakan tugas serta memadukannya sangat diperlukan utnuk mencapai tujuan.

d. Meningkatkan Kualitas

Dalam meningkatkan kualitas koordinasi, meminimalkan keberadaan masalah menjadi factor penting ketika melaksanakan koordinasi. Selain itu koordinasi juga perlu dilakukan secara rutin supaya terjalinnya hubungan baik antar pihak yang saling berkoordinasi. Dan dalam perwujudan kualitas perlu adanya hal yang perlu diperhatikan seperti sikap, tindakan, dan langkah yang diambil oleh pimpinan

e. Jaringan Dalam Hubungan Kerja

Hubungan kerja menjadi faktor dilaksanakannya koordinasi dan juga menjadi penghubung dari berbagai pimpinan dalam pengambilan keputusan. Hubungan kerja perlu dipelihara untuk menghindari tantangan dalam organisasi yang akan mengakibatkan situasi yang tidak efektif dan efisien

f. Penyelarasan Tindakan

Keterpaduan pelaksanaan akan mempengaruhi keputusan yang akan diambil serta akan mengurangi beban kerja. Keselarasan tindakan juga dipengaruhi setiap individu maupun kelompok berdasarkan fungsinya.

g. Penataan Spesialisasi Dalam Keaneragaman

Pembagian tugas dilakukan untuk menspesifikasikan tugas dengan ahlinya dan menghasilkan keaneragaman penugasan. Hal ini juga dipengaruhi dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi yang menjadi acuan dalam menjalankan berbagai kegiatan.

1.6.1.4 Bentuk Koordinasi

I. Koordinasi Vertical

Kegiatan koordinasi yang dilakukan oleh individu-individu atau kelompok-kelompok yang memiliki perbedaan jabatan dan dikategorikan sebagai atasan dan bawahan. Dalam koordinasi vertical juga ada 4 elemen, yaitu:

a. Chain of Command

Pelaporan tanpa putus dari bawahan ke atasan, hal ini supaya memperjelas apa dan siapa saja yang terjadi selama kegiatan dilakukan.

b. Span of Control

Pengawasan yang dilakukan oleh atasan kepada bawahan secara efektif dan efisien. Sehingga dalam pelaksanaan tugas, pimpinan akan membagi tugas sesuai dengan bidangnya dan tentunya melakukan pengawasan

c. Delegation

Hak yang dimiliki oleh pimpinan dalam memberikan perintah kepada bawahan dan dipatuhi dalam memberikan penugasan pimpinan juga memiliki wewenang untuk memilih bawahan sesuai dengan kemampuan. Hal ini dilakukan karena pimpinan memiliki tanggung jawab besar terhadap keberlangsungan proses penugasan dan juga hasil akhir.

d. Sentralisasi-Desentralisasi

Sentralisasi yang ada lebih menjelaskan mengenai tanggung jawab dan batasan yang dimiliki oleh pimpinan. Segala pengambilan keputusan berada pada puncak hirarki organisasi, bawahan tidak mempunyai hak dan wewenang dalam pengambilan keputusan. Desentralisasi yang ada memberikan penjelasan bahwa setiap bidang yang ada mempunyai hak dalam pengambilan keputusan berdasarkan level organisasi. Hal ini berdasarkan asumsi bahwa dalam pengambilan keputusan dalam menghadapi permasalahan membutuhkan bantuan dari pihak sekitar yang benar memahami.

II. Koordinasi Horizontal

Kegiatan koordinasi yang dilaksanakan oleh individu atau kelompok yang memiliki tingkatan yang sama dalam hirarki yang ada. Dalam koordinasi horizontal juga ada 4 elemen, yaitu:

a. Departemenisasi Matriks

Pengintegrasian peranan dan pengelompokan struktur dalam menggunakan wewenang pada pelaksanaan tugas, sehingga akan memerlukan koordinasi yang tinggi.

b. Pembentukan Tim Fungsional

Pembentukan tim yang saling berkaitan secara fungsional dengan melakukan Kerjasama

c. Satuan Tugas

Satuan tugas biasanya dibentuk secara formal dan dilaksanakan secara teratur dan biasanya dibentuk apabila adanya permasalahan yang bersifat khusus. Terbentuknya satuan tugas akan meningkatkan efisiensi dan efektifitas kerja.

d. Personil Penghubung

Pihak yang ditugaskan sebagai penghubung antara satu bagian dengan bagian lainnya. Fungsi utama adanya pihak penghubung adalah untuk memudahkan komunikasi yang dilakukan supaya tidak rumit.

1.6.2 Teknologi Informasi dan Komunikasi mempengaruhi Struktur Organisasi, Kultur Organisasi, dan Koordinasi

1.6.2.1 Teknologi Informasi dan Komunikasi mempengaruhi Struktur Organisasi

Untuk mencapai tujuan organisasi secara menyeluruh, pemanfaatan teknologi informasi menjadi jalan alternative yang tepat untuk diterapkan. Kelebihan dari penggunaan teknologi informasi pada struktur organisasi adalah peningkatan akses pada informasi secara akurat dan tepat waktu dan mengurangi jumlah penyangga (*inventory buffer*), serta dalam pengoperasian internal lebih efisien. Terlebih lagi trend yang ada pada teknologi informasi tidak lepas dari pengolahan data source atau sumber data yang berpengaruh pada pelaksanaan kinerja organisasi. Pengelolaan data yang akurat akan membantuk organisasi dalam pengambilan keputusan demi kepentingan eksternal dan mencapai tujuan internal (Taufiq, 2017). Dengan kemudahan dari keberadaan teknologi informasi dalam pengelolaan data hingga pengambilan keputusan, maka setiap bagian yang berada di organisasi akan mendapatkan kemudahan untuk menjalankan tugas dan fungsinya.

Keberadaan teknologi informasi dan komunikasi juga menjadi penghubung antar individu yang ada didalam sebuah organisasi. Tingkat dari penggunaan teknologi dalam pengelolaan seluruh kegiatan sudah menjadi proritas karena kemudahan dalam penggunaan dan pengelolaan data. Dalam organisasi, pengelolaan data yang banyak sudah menjadi tugas keseharian yang selalu dikelola, dan sudah menjadi keseharusan dalam organisasi menjadikan teknologi informasi dan komunikasi menjadi jalan alternatif yang tepat. Selain mempermudah dalam pengelolaan data, keberadaan dari adanya teknologi informasi adalah sebagai faktor pendorong perubahan bagi struktur, artinya akan ada perubahan yang terjadi disuatu bidang yang lain dan akan mempengaruhi perubahan pada struktur organisasi (Rahmawati, 2015).

1.6.2.2 Teknologi Informasi dan Komunikasi mempengaruhi Kultur Organisasi

Pengaruh keberadaan teknologi informasi menjadi pintu bagi terbukanya berbagai hal, salah satunya adalah budaya. Budaya merupakan aktivitas yang dilakukan secara terus menerus dalam suatu lingkup dan dalam jangka waktu yang lama sesuai dengan norma yang berlaku. Dalam sebuah organisasi juga ada budaya yang diterapkan oleh setiap individu sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan di organisasi. Sebuah kebiasaan yang telah diterapkan dalam jangka waktu yang lama juga akan mengalami perubahan sedikit demi sedikit sesuai dengan perkembangan kondisi sosial, teknologi dan kondisi lainnya (Setiawati, 2018).

Tidak hanya teknologi informasi dan komunikasi saja yang mengalami perubahan secara signifikan, tetapi kebiasaan pada setiap individu maupun kelompok juga mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Perubahan yang terjadi dipengaruhi oleh faktor sekitar seperti lingkungan, sosial, hingga perubahan teknologi itu sendiri. Dalam menghadapi perubahan yang berkelanjutan, maka perlunya penyesuaian secara bertahap untuk mengimbangi perubahan yang terjadi. Namun dalam mengimbangi perubahan yang ada, dalam sebuah organisasi tidak boleh meninggalkan asas dari organisasi tersebut, sehingga tujuan dari keberadaan sebuah organisasi tersebut tetap tercapai dengan didukung oleh perkembangan teknologi dan perubahan kultur yang ada.

1.6.2.3 Teknologi Informasi dan Komunikasi mempengaruhi Koordinasi

Berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi memberikan perubahan terhadap beberapa hal seperti pelacakan, pemrograman, penyedia informasi hingga media dalam menjalin komunikasi. Hubungan media dengan komunikasi pemerintah sangat penting dalam memahami hal-hal yang berkaitan dengan birokrasi pemerintah. Transparansi kegiatan di pemerintahan dapat terlihat dengan penggunaan media komunikasi, dan juga dapat mencegah permasalahan di pemerintah itu sendiri. Salah satu komunikasi yang sedang dijalankan di abad ke-20 ini adalah dengan penggunaan media social yang sedang digemari berbagai

kalangan. Selain dengan penggunaan yang menyeluruh, penggunaan media social juga lebih mudah untuk digunakan dan di telusuri sehingga segala informasi yang di sediakan akan tersampaikan secara tepat (Meijer & Torenvlied, 2015). Memang tidak semua aplikasi media social dapat digunakan dalam penyampaian informasi, namun sebagian besar aplikasi yang ada selalu memberikan layanan dalam penyediaan informasi dengan didukung oleh layanan virtual. Aplikasi yang sering digunakan seperti Facebook, Twitter, Instagram, hingga aplikasi yang dibuat oleh badan tertentu yang mendukung terjalannya komunikasi.

Peranan pemerintah dalam memberikan akses bagi masyarakat untuk mengetahui bentuk kinerja, hubungan kerja, hingga tindak lanjut yang dilaksanakan terhadap permasalahan tertentu. Dengan segala permintaan hal yang ingin diketahui secara menyeluruh dengan kemudahan akses dan pemahaman, penggunaan aplikasi atau media social menjadi jalan yang dimasa tepat untuk diterapkan. Keterampilan dalam penggunaan aplikasi maupun media social juga factor penting, penyajian informasi yang disusun semenarik mungkin akan mudah dipahami pembaca dengan mudah (Oluoch, 2016). Kelebihan dalam penggunaan media informasi juga menjadi alasan utama, seperti kemanan data, akses secara universal, pengembangan sumber daya manusia, hingga biaya yang dikeluarkan. Factor yang ada menjadi pertimbangan besar penggunaan teknologi informasi dan komunikasi pada ranah pemerintahan.

1.6.3 Struktur Organisasi mempengaruhi Kultur Organisasi, dan Koordinasi

1.6.3.1 Struktur Organisasi memengaruhi Kultur Organisasi

Suatu organisasi akan lebih mudah mencapai tujuannya ketika adanya kejelasan dalam pembagian kerja, dalam organisasi hal seperti ini disebut juga sebagai struktur organisasi. Dengan struktur yang ada, pembagian tugas dan fungsi setiap anggota akan jelas dan akan berpengaruh kepada kinerja anggota dalam mencapai tujuan. Selain keberadaan struktur, dari struktur organisasi juga tidak lepas dari budaya organisasi. Kebiasaan setiap individu dalam mengimplementasikan norma/

peraturan yang berlaku dalam sebuah organisasi mewujudkan kultur yang tumbuh didalam organisasi itu sendiri. Budaya yang sering diterapkan secara terus menerus akan menjadikan nilai kesatuan dan kesiapan organisasi dengan tantangan, peluang dan kondisi yang akan dihadapi oleh organisasi kedepannya. Budaya dengan struktur organisasi merupakan dua hal yang berperan sebagai penggerak organisasi yang saling mengisi satu sama lain. Dari struktur yang melahirkan nilai atau norma yang berlaku, dan budaya organisasi tercipta dari pola interaksi yang dihasilkan dari pengisian struktur organisasi (Sunandar, 2017).

Dalam menyelaraskan struktur dan kultur, akan adanya keseimbangan tindakan yang diterapkan dalam sebuah organisasi. Kedua hal tersebut akan saling berkaitan dan saling mempengaruhi. Apabila kultur dengan struktur tidak berjalan seimbang, akan adanya ketimpangan seperti tidak maksimalnya kinerja akibat dari salah satu factor seperti cara bekerja, kebiasaan bekerja hingga ketidaktahuan tupoksi pekerjaan. Dalam sebuah organisasi memang adanya pembagian kerja setiap individu atau bagian, namun pembagian kerja hanya sebagai penjelas dan dalam penerapannya semua pembagian yang dikerjakan akan saling mempengaruhi untuk mencapai tujuan dari organisasi tersebut.

1.6.3.2 Struktur Organisasi mempegaruhi Koordinasi

Pembagian penugasan yang dilakukan oleh pimpinan menjadi wujud perbedaan wewenang yang dimiliki oleh bawahan dengan pimpinan. Dalam organisasi sudah tidak asing lagi dengan perbedaan jabatan yang ada atau lebih sering dikenal dengan struktur. Hal ini dilakukan agar tidak adanya tumpang tindih jabatan dan penugasan ketika pelaksanaan kegiatan berlangsung. Lebih tepatnya ada keterbatasan individu maupun kelompok dalam melakukan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing. Hubungan keberadaan struktur organisasi dengan pelaksanaan koordinasi adalah sebagai wadah bagi keberagaman pemikiran dan tindakan dalam mewujudkan tujuan yang sama. Kontribusi dari berbagai pihak yang aktifkan menunjukkan hubungan baik antara satu pihak dengan pihak yang lain

dan dapat bekerja sama dengan perbedaan fungsi dan tujuan yang dimiliki (Müller et al., 2018). Dengan koordinasi yang dilakukan oleh setiap pihak, beberapa keuntungan akan diperoleh seperti pemberdayaan sumber daya manusia, kepemimpinan individu dalam menangani permasalahan, hingga melatih mental individu dan tim untuk meningkatkan kualitas.

Pembagian kerja yang diterapkan akan menjadi satu kesatuan ketika perwujudan sebuah tujuan. Dalam pembagian kerja setiap individu ataupun bagian akan menyelesaikan tugas sesuai dengan tupoksi pekerjaannya, sehingga antar satu dengan yang lain akan menyelesaikan hasil yang berbeda namun dalam tujuan yang sama. Sehingga perlunya koordinasi yang dilakukan antar pihak yang ada, kemudian disimpulkan menjadi hasil yang dituju dengan melakukan koordinasi. Pembagian kerja bukan hanya sebagai penjabar dalam tupoksi pekerjaan, namun juga hal yang menjadi terciptanya koordinasi antar satu pihak dengan pihak yang lain. Adapun factor koordinasi yang mempengaruhi struktur organisasi, yaitu

1) Kesatuan Tindakan

Dalam melakukan koordinasi tentunya menjadi sebuah bentuk tanggung jawab unit terkait dalam menyatukan pemikiran dalam mewujudkan tujuan kegiatan, sehingga setiap unit tidak bekerja secara sendiri-sendiri. Penerapan konsep kesatuan tindakan menjadi focus dilaksanakan koordinasi. Dalam penerapan ini menunjukkan adanya peran dari pimpinan untuk mengatur usaha-usaha yang dilakukan untuk diselenggarakan. Dari kesatuan tindakan juga menggambarkan bentuk tanggung jawab dari pimpinan dalam mengatur pelaksanaan, baik waktu hingga penugasan setiap unit, sehingga target yang telah direncanakan dapat terealisasikan tepat waktu.

2) Komunikasi

Melakukan sebuah koordinasi tentunya tidak lepas dari kegiatan komunikasi. penghubung antara satu unit dengan unit lain adalah dengan berkomunikasi, sehingga setiap hal yang akan disampaikan dan dibahas perlu untuk dikomunikasikan dengan baik. Komunikasi juga akan menunjukkan partisipasi dari setiap anggota ataupun unit, semakin tinggi komunikasi yang dilakukan, maka akan semakin transparan juga hal yang di koordinasikan.

3) Pembagian Kerja

Mencapai tujuan bersama merupakan hasil dari kegiatan yang dilakukan oleh lebih dari satu pihak, keterbatasan mencapai tujuan jika pelaksanaanya secara sendiri. Pembagian kerja yang tepat menjadi penentu dalam melaksanakan kegiatan secara menyeluruh dan terstruktur. Prinsip dari pembagian kerja sendiri adalah akan pengklasifikasian kinerja yang akan dilakukan, sehingga tidak adanya tumpang tindih pekerjaan.

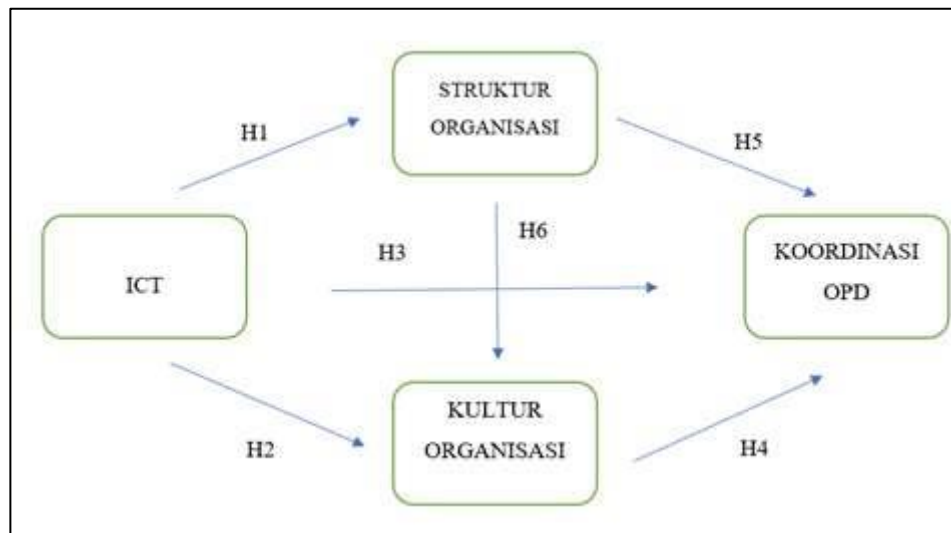
1.6.4 Kultur Organisasi mempengaruhi Koordinasi

Kultur organisasi biasanya berkaitan dengan karakter dari sebuah organisasi yang dijalankan. Semua pihak yang berada dibawah naungan organisasi harus mengikuti budaya organisasi yang ada. Dengan pelaksanaan budaya organisasi maka citra dari organisasi tersebut dapat terlihat dengan sendirinya. Budaya dalam sebuah organisasi akan membentuk keterampilan anggotanya dalam berperilaku sesuai yang diharapkan. Ada yang berupa kebijakan atau aturan yang dibuat oleh pemimpin dalam menjalankan organisasi agar tujuan yang ada dapat terlaksana. Selain itu, budaya yang ada dapat membantu dalam pembuatan keputusan dan penyusunan strategi yang melibatkan pemimpin dan anggota organisasi, sehingga akan adanya koordinasi yang terjalin di dalamnya. Adapun factor koordinasi yang mempengaruhi kultur organisasi, yaitu disiplin. Disiplin dapat dikatakan sebagai perilaku atau upaya dalam menaati sebuah peraturan berlaku. Dalam melakukan

koordinasi juga sangat penting dalam menerapkan perilaku ini. Penerapan peraturan oleh individu ataupun organisasi menjadi sikap positif dan menjadi membantu pelaksanaan koordinasi secara tepat. Perilaku disiplin juga akan membuat perubahan baik pada individu maupun kelompok dalam mencapai tujuan, dalam pelaksanaan kegiatan akan sesuai dengan rencana dan tepat dengan menerapkan sikap disiplin.

Menurut Mulyaningsih (2019), yang sangat mempengaruhi dalam menjalankan organisasi, budaya yang dijalankan akan berpengaruh secara signifikan terhadap efektivitas organisasi. Perilaku individu yang dilakukan merupakan sebuah turunan dari budaya sebelumnya, dan budaya organisasi lebih berpengaruh terhadap efektivitas organisasi dibandingkan pada faktor perilaku birokrasi.

Gambar 1.1 Kerangka Teoritik.



1.7 Hipotesa

H1: Teknologi Informasi dan Komunikasi mempengaruhi Struktur Organisasi

H2: Teknologi Informasi dan Komunikasi mempengaruhi Kultur Organisasi

H3: Teknologi informasi dan komunikasi mempengaruhi koordinasi antar OPD

H4: Kultur organisasi mempengaruhi koordinasi antar OPD

H5: Struktur organisasi mempengaruhi koordinasi antar OPD

H6: Struktur organisasi mempengaruhi kultur organisasi

1.8 Definisi Konseptual

Definisi Konseptual merupakan batasan terkait setiap variable masalah yang dijadikan sebagai pedoman dalam penelitian sehingga dapat memudahkan para penulis atau peneliti untuk langsung penelitian di lapangan. Pada penelitian ini maka ada beberapa definisi konseptual yaitu:

1.8.1 Koordinasi OPD

Dalam mewujudkan tujuan dalam organisasi tentunya melibatkan beberapa pihak dalam pelaksanaannya. Koordinasi sendiri merupakan sebuah tindakan untuk memadukan tujuan dari kegiatan yang dijalankan secara efisien. Koordinasi dilakukan sesuai dengan kebutuhan komunikasi sehingga sifat ketergantungan tidak akan memberatkan.

1.8.2 Struktur organisasi

Struktur organisasi yang dimaksud lebih kepada pembagian kerja. Dimana pembagian kerja yang diterapkan akan menjadi satu kesatuan ketika perwujudan sebuah tujuan. Dalam pembagian kerja setiap individu ataupun bagian akan menyelesaikan tugas sesuai dengan tupoksi pekerjaannya, sehingga antar satu dengan yang lain akan menyelesaikan hasil yang berbeda namun dalam tujuan yang sama

1.8.3 Kultur organisasi

Kultur organisasi merupakan kebiasaan atau tindakan yang sering dilakukan dalam organisasi. Kultur organisasi biasanya berkaitan dengan karakter dari sebuah organisasi yang dijalankan. Semua pihak yang berada dibawah naungan organisasi harus mengikuti budaya organisasi yang ada. Dengan pelaksanaan kultur organisasi maka citra/ image dari organisasi tersebut dapat tercermin dengan sendirinya.

1.8.4 ICT (Information Communication and Technology)

Keberadaan teknologi informasi dan komunikasi menjadi penghubung antar individu yang ada didalam sebuah organisasi. Tingkat dari penggunaan teknologi dalam pengelolaan seluruh kegiatan sudah menjadi prioritas karena kemudahan dalam penggunaan hingga pengelolaan data. Sehingga ICT menjadi alat bantu dalam sebuah organisasi dalam menjalankan tugas sesuai dengan tujuan yang akan di capai.

1.9 Definisi Operasional

Definisi operasional mengoperasikan konstruk yang dipelajari untuk menjadi variable yang dapat diukur sehingga peneliti dapat melakukan replikasi pengukuran dengan cara yang sama dalam mengembangkan pengukuran tersebut (Sugiyono, 2015)

Tabel 1.1 Definisi Operasional

Variabel	Indikator
Koordinasi pelaksanaan input data perencanaan pembangunan pada aplikasi “Bank Data”	<ol style="list-style-type: none">1. Pemanfaatan keberadaan ICT dilingkungan pemeritahan.2. Penerapan dari Kultur Organisasi yang membangun kebiasaan dilingkungan pemerintahan3. Peranan dari setiap pihak yang telah diatur dalam Struktur Organisasi
Faktor- Faktor yang mempengaruhi Koordinasi OPD	<ol style="list-style-type: none">1. Peranan dari sosok pemimpin dalam menjalankan atau mengatur sebuah organisasi.2. Adanya kesatuan yang dilaksanakan dalam

	<p>menjalankan tindakan yang dilakukan oleh organisasi.</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Kelancaran dalam menjalankan tugas tanpa adanya tumpang tindih pekerjaan antar organisasi. 4. Adanya proses (continues process). Koordinasi menjadi pekerjaan yang berkesinambungan sehingga perlu dikembangkan untuk mencapai tujuan. 5. Adanya tujuan yang jelas dalam melakukan koordinasi, dan tujuan yang ada menjadi kesatuan usaha dalam bekerja.
ICT	<ol style="list-style-type: none"> 1) Keberadaan ICT dapat menjadi alternatif dalam melaksanakan koordinasi 2) Penggunaan ICT menjadi pilihan yang tepat bagi organisasi dalam melakukan koordinasi menyelesaikan tugas dengan cara yang tepat. 3) Dengan ICT memberikan kemudahan bagi organisasi dalam menyelesaikan tugas serta melakukan koordinasi.

	<p>4) Keberadaan ICT memberikan hasil akhir yang memuaskan bagi penyelesaian tugas.</p>
Struktur Organisasi	<p>1) Sikap disiplin menjadi sikap yang sangat membantu dalam menjalankan koordinasi.</p> <p>2) keterampilan yang dimiliki dalam menjalankan sebuah tugas.</p> <p>3) Pembagian tugas yang sesuai sehingga efektivitas dalam organisasi dapat terlaksana,</p> <p>4) Mendukung terwujudnya prestasi kerja pegawai.</p>
Kultur Organisasi	<p>1. Adanya kesatuan tindakan yang diambil pada saat menjalankan tugas.</p> <p>2. Pembagian penugasan yang tepat dan sesuai sehingga tidak adanya tumpang tindih antar satu tugas dengan tugas yang lain dan juga antar pihak satu dengan pihak yang lain.</p> <p>3. Adanya komunikasi yang terus dilaksanakan agar terjalinnya hubungan baik pada saat pelaksanaan tugas</p>

	4. Profesionalitas atau dapat bekerja dengan baik tanpa melibatkan masalah pribadi ke dalam pekerjaan.
--	---

1.10 Desain Metode Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan mengenai kordinasi yang dilakukan oleh organisasi perangkat daerah serta factor- factor yang mempengaruhi. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan mix metode. Mix metode sendiri merupakan kombinasi antara penelitian kualitatif dengan penelitian kuantitatif. Menurut Sugiyono (2016) penelitian kombinasi (mix methods) merupakan suatu metode peneitan dengan menggabungkan penelitian kualitatif dan kuantitatif dalam melakukan sebuah penelitian, yang nantinya akan dihasilkan data yang komperhensif, valid, reliabel dan obyektif.

Metode kualitatif merupakan metode yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah. Dimana peneliti sebagai instrument kunci, kemudian melakukan pengambilan sampel sumber data, dilankutkan dengan teknik pengumpulan data dan analisis, dan hasil penelitian kaulitatif lebih menekankan pada generalisasi (Sugiyono, 2016). Metode kuantitatif sendiri merupakan kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian datanya berdasarjan jumlah secara objektif untuk memecahkan suatu persoalan atau menguji hipotesis (Duli, 2019). Pada penelitian kuantitatif lebih menekankan pada data numberikatau angak yang dikelola menggunakan metode statistik. Dari segi penelitian dan tujuan, menggunakan metode ini dapat menguji teori dalam penelitian serta menyajikan dan mendiskripsikan suatu statistik yang disajikan. Deskripsi yang membahas mengenai setiap variabel yang ada maka dapat dikembangkan menjadi sebuah konsep yang menjeaskan banyak hal.

Penelitian ini juga menjelaskan mengenai variabel independen dan dependen, dimana tidak hanya menjelaskan mengenai sebab akibat tapi juga timbal balik antar variabel. Dengan menggunakan metode ini, maka akan dijelaskan mengenai variabel independen yang terdiri ICT kultur organisasi, struktur organisasi, dan juga koordinasi antar pihak terkait. Pada penelitian ini menggunakan metode survey dalam mendapatkan data primer mengenai pelaksanaan koordinasi input data perencanaan pembangunan pada aplikasi “bank data” dan factor yang mempengaruhi koordinasi perangkat daerah, serta kuisisioner yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuisisioner terstruktur sebagai instrumen dalam mendapatkan data primer.

1.10.1 Kuisisioner

Dalam memperoleh data yang diperlukan, penelitian ini menggunakan kuisisioner untuk mendapatkan data primer. Pengumpulan data dengan menggunakan kuisisioner merupakan teknik pengumpulan yang dilakukan dengan cara memberikan pertanyaan atau pernyataan secara tertulis kepada responden (Sugiyono, 2016). metode ini merupakan salah satu metode yang digunakan ketika melakukan survei atau studi lapangan. Dalam pemberian jawaban, reponden diberikan pilihan untuk menjawab sesuai dengan kondisi yang sesungguhnya. Jenis angket yang digunakan penulis adalah angket terstruktur dan tertutup, dimana skor menjadi jawaban yang disediakan dalam angket. Berikut tabel penilaian yang ada pada angket yang digunakan dalam penelitian

Tabel 1.2 Penilaian Skor Pernyataan

Jenis Jawaban	Skor
Sangat Tidak Setuju	1
Tidak Setuju	2
Netral	3
Setuju	4

Sangat Setuju	5
---------------	---

1.10.2 Wawancara

Pada penelitian ini juga menggunakan wawancara untuk melengkapi data yang dibutuhkan. Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk mendapatkan data, bertukar informasi hingga dijadikan sebuah kesimpulan (Sugiyono, 2016). Penelitian ini mewawancarai beberapa perwakilan dari organisasi perangkat daerah yang terkait dengan pelaksanaan input data pada aplikasi Bank Data. Hasil wawancara dipakai sebagai data pendukung pada penelitian ini, sehingga hasil yang ada pada penelitian ini juga disesuaikan dengan kondisi yang ada di lapangan. Narasumber pada penelitian ini adalah Bapak Alex Kusbiyanto, SE dari bidang Statistik dan Persandian Kominfo dan Bapak Eko Kus Prasetyo dari Bidang Komunikasi Kominfo. Pelaksanaan wawancara dilakukan di Dinas Kominfo kabupaten Temanggung yang beralamat di Jalan Jendral Sudirman No. 41-42 Temanggung. Wawancara dilakukan kepada dua narasumber dari Dinas Kominfo dikarenakan narasumber memiliki pengetahuan yang mencakup segala hal yang berkaitan dengan pelaksanaan input data perencanaan pembangunan pada aplikasi “Bank Data”.

1.10.3 Tinjauan Kepustakaan

Untuk lebih memperkuat jawaban dari responden dari pengisian kuisioner, peneliti juga menggunakan data yang diperoleh dari berbagai sumber lain seperti jurnal, buku, website dan dokumen lain yang berhubungan dengan topik penelitian sehingga data yang disajikan akan valid.

1.11 Lokasi Survei dan Target Responden

Lokasi penelitian yang dilakukan berada di Kabupaten Temanggung, hal ini di latar belakanginya adanya penghargaan yang diterima kabupaten Temanggung sebagai

Kabupaten dengan Perencanaan dan Pencapaian Tingkat Kabupaten Tahun 2020 dari Kementerian Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas). Alasan lain dalam pemilihan lokasi adalah karena Kabupaten Temanggung mengalami peningkatan dalam perencanaan pembangunan, yang dipengaruhi oleh koordinasi yang dilakukan oleh OPD terkait dalam prosesnya. Sedangkan responden dari penelitian ini adalah seluruh Organisasi Perangkat Daerah yang terlibat dalam Perencanaan Pembangunan di Kabupaten Temanggung sebanyak 29 OPD.

1.12 Populasi dan Sampling

1.12.1 Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari objek/ subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan (Sugiyono, 2016). Populasi sendiri merupakan jumlah dari keseluruhan unit yang menjadi subjek penelitian. Populasi pada penelitian ini mengambil keseluruhan jumlah Organisasi Pemerintah Daerah yang ada di Kabupaten Temanggung Tahun 2020. Adapun jumlah populasi pada penelitian ini yaitu 6.670.

1.12.2 Sampel

Menurut Yusuf (2014) sampel merupakan bagian dari populasi terpilih yang mewakili populasi yang ada. Dalam menentukan sampel juga disesuaikan dengan karakteristik dan terbatas dari populasi yang ada. Dalam menentukan jumlah sampel, peneliti menggunakan Rumus Slovin, dengan menggunakan rumus ini maka jumlah populasi yang jelas dan akurat dapat diukur dengan menggunakan rumus ini. Penulis menggunakan sampling error sebesar 10% dengan tingkat keakuratan 90%, berikut merupakan rumusnya:

$$N = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

Keterangan:

n = Sampel Size

N = Populasi

e = Sampling error

Jumlah populasi dalam penelitian ini adalah 6.670 perangkat daerah yang berada di Kabupaten Temanggung, sehingga presentase kelonggaran yang digunakan adalah 10% dengan hasil perhitungan n yang dibulatkan untuk mencapai kesesuaian. Maka dilakukan perhitungan sample sebagai berikut:

$$\begin{aligned}n &= \frac{6.670}{1 + 6.670(10\%)^2} \\n &= \frac{6.670}{67.70} \\n &= 98 \text{ orang.}\end{aligned}$$

Dengan perhitungan diatas maka sampel yang menjadi responden pada penelitian ini sebanyak 100 perangkat daerah di Kabupaten Temanggung. Penelitian ini menggunakan teknik *random sampling*, dimana teknik ini digunakan untuk mengurangi kesalahan dan juga ketepatan target yang dituju. Sedangkan jenis *simple random sampling* yang dipilih merupakan sebuah pemilihan sample secara undian dengan tidak memilih kembali sampel yang sudah terpilih (*without replacement*)(Yusuf, 2014).

1.13 Pengukuran dan Analisis Data

Metode pengumpulan data studi ini menggunakan pertanyaan- pertanyaan survei kuantitatif yang dikembangkan dari indikator yang terdapat pada variable. Kuisisioner yang digunakan juga merupakan jenis kuisisioner yang bersifat tertutup dengan menggunakan skala likert. Skala likert digunakan untuk menentukan pendapat responden yaitu 1 untuk sangat tidak setuju, 2 tidak setuju, 3 netral, 4 setuju, dan 5 sangat setuju.

Setelah dilakukannya pengelompokan data serta reduksi data maka selanjutnya dilakukan dengan analisis data dengan cara analisis data kuisisioner yangmana pada penelitian ini data kuisisioner di analisis menggunakan Analisis Partial Square (PLS) dengan alat bantu nya yaitu SmartPLS 3.0. PLS merupakan salah satu metode alternative statistic Structural Equation Modelling (SEM) berbasis varian yang di desain untuk menyelesaikan regresi ganda ketika terjadi permasalahan pada data, seperti ukuran sampel peneliti kecil, ataupun data yang hilang.

Menurut Ghozali & Latan, analisis data dua sub model yaitu outer model dan inner model (2015). Model pengukuran digunakan untuk menguji validitas dan juga realibilitas, sedangkan model inner untuk uji kasualitas. PLS dapat mengukur data dengan skala berbeda secara bersamaan, serta dapat dijalankan pada data berukuran kecil yaitu 10 skala dengan jumlah terbesar dari indikator yang bersifat formatif. Alasan peneliti menggunakan PLS karena keunggulan PLS seperti informasi yang dihasilkan efisien dan mudah di interpretasikan terutama pada model yang hipotesis model. Walaupun dengan sampel yang kecil PLS mampu untuk dijalankan, apalagi dengan sampel yang besar sehingga PLS sangat sesuai dengan yang digunakan pada penelitan ini. Dan yang paling penting bahwa penggunaan PLS tidak terlalu rumit.

1.14 Desain Kuisisioner

Tabel 1.3 Desain Kuisisioner

Variable	Indikator
ICT	<ol style="list-style-type: none"> 1. Alternatif baru yang digunakan dalam menjalankan tugas 2. Pemilihan cara yang tepat dalam menyelesaikan tugas 3. Kemudahan dalam menyelesaikan tugas

	<ol style="list-style-type: none"> 4. Hasil akhir yang memuaskan.
Kultur Organisasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sikap disiplin yang diterapkan dalam organisasi 2. Keterampilan yang terbangun dalam organisasi 3. Efektivitas organisasi 4. Mendukung prestasi kerja pegawai.
Struktur Organisasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kesatuan tindakan yang diambil antar pihak 2. Pembagian kerja yang sesuai 3. Komunikasi yang berkelanjutan 4. Sikap profesional.
Koordinasi OPD	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peranan dari sosok pemimpin dalam menjalankan atau mengatur sebuah organisasi. 2. Adanya kesatuan yang dilaksanakan dalam menjalankan tindakan yang dilakukan oleh organisasi. 3. Kelancaran dalam menjalankan tugas tanpa adanya tumpang tindih pekerjaan antar organisasi. 4. Adanya proses (continues process). Koordinasi menjadi pekerjaan yang berkesinambungan sehingga perlu dikembangkan untuk mencapai tujuan. 5. Adanya tujuan yang jelas dalam melakukan koordinasi, dan tujuan yang ada menjadi kesatuan usaha dalam bekerja.

